

STUDI TEORI KEBIJAKAN TERHADAP IMPLEMENTASI BELANJA LANGSUNG PENDIDIKAN (Studi Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin)

H. Gt. Irhamni*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan teori kebijakan dalam implementasi mengelola belanja langsung pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, melalui pendekatan variabel komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi belanja langsung pendidikan ternyata para aparatur/pejabat pelaksana kegiatan belanja langsung tersebut, setelah dicermati satu-persatu empat variabel tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya cukup bersenergi dan ukuran kinerja anggarannya dalam realisasinya sebagian besar kegiatannya mencapai target sasaran., walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti masih terbatasnya tenaga akuntansi keuangan/bendahara belanja langsung, dan tenaga pengadaan barang/jasa yang belum memiliki sertifikasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai kebijakan atau beberapa perangkat peraturan-peraturan yang mengatur pendanaan/anggaran pembangunan, agar dalam implementasinya berjalan transparan, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya menyangkut mengatur belanja langsung, karena selama ini dalam implementasi belanja langsung ternyata banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, antara

lain salah satunya yang banyak disoroti adalah temuan-temuan kasus penyimpangan kegiatan belanja langsung bidang pendidikan. Menurut temuan Ade (2008) dikatakan bahwa kebocoran dana pendidikan yang paling besar terjadi dalam belanja langsung pengadaan gedung dan sarana-prasarana sekolah. Dengan adanya kasus seperti itu, maka perlu dikaji seperti apa implementasi kebijakan yang diterapkan dilihat dari berbagai pendekatan dan keterkaitan berbagai aspek, untuk mengetahui masalah dan kelemahan dalam mengelola belanja langsung.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi implementasi teori kebijakan terhadap belanja langsung pendidikan dari segi :

1. Komunikasi (transmisi, konsistensi, dan kejelasan)
2. Sumber-sumber (staf dengan keahlian, wewenang dan fasilitas)
3. Kecenderungan-kecenderungan/tingkah laku
4. Struktur birokrasi (presedur kerja dan fragmentasi)

LANDASAN TEORI

Sanusi (2008: 2) bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya

* *Tenaga Pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan*

alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Irfan Islamy (2006 : 20) menindaklanjuti pengertian tersebut :

1. Sebagai tindakan pemerintah
2. Sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat.
3. Sebagai rancangan program-program

Refley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2007 : 36) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, dan keluaran. Grindle (1980 : 78) juga memberikan pandangan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu *linkage* yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dari pendapat diatas Edwards (1980 : 2) membagi empat variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi (transmisi, konsisten, dan kejelasan)
2. Sumber-sumber (Staf yang memadai serta keahlian-keahlian, wewenang dan fasilitas)
3. Kecenderungan-kecenderungan/tingkah laku
4. Struktur birokrasi (prosedur kerja dan fragmentasi)

Kebijakan yang kita sorot dalam studi ini menyangkut belanja langsung. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2008 : 94) pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraian pemaknaan partisipasi tentang situasi dan peristiwa.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjaremasin, dan sebagai objeknya adalah menyangkut kegiatan belanja langsung pendidikan tahun anggaran 2009 (APBD tahun 2009).

Sumber Informasi

Sumber informasi diperoleh dari data skunder dalam bentuk dokumen-dokumen penting seperti ; APBD Kota tahun 2009, RPJM, RENSTRA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP), rencana kerja anggran, laporan evaluasi kinerja anggaran, dan lain-lain. Selain itu juga diperoleh data primer dari beberapa karyawan/pejabat yang terkait pengelolaan anggaran belanja langsung pendidikan.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa karyawan/pejabat yang dijadikan sebagai informan, dengan cara :

- a. Snowball sampling technique, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.
- b. Triangulasi, dengan cara men-check dan membandingkan dengan sumber-sumber data lainnya.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian implementasi kebijakan belanja langsung pendidikan, dapat dikaji melalui pendekatan teori kebijakan menurut Edwards.

Komunikasi

Komunikasi adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dan mengerti apa yang harus mereka lakukan.

a. Transmisi

Dalam pelaksanaan belanja langsung pendidikan, terlihat adanya bentuk transmisi, yaitu adanya penyampaian informasi tentang peraturan-peraturan, dan petunjuk pelaksana/teknis, seperti : PP, No 58, tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No 8, tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri No 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perwali No 19 tahun 2008, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui sosialisasi, pertemuan teknis dan asistensi, sehingga mereka tidak merasa ragu dalam melaksanakannya.

b. Konsisten

Untuk menyamakan persepsi terhadap pengelolaan kegiatan belanja langsung, Pemerintah Kota melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Wilayah Kalimantan, untuk memberikan arahan-arahan, asistensi dan pelatihan, sehingga diharapkan adanya konsistensi pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Kejelasan

Dalam implementasi kebijakan tidak cukup hanya transmisi dan konsisten saja, tetapi juga harus ditambah dengan kejelasan

dari peraturan/kebijakan itu sendiri. Kejelasan merupakan bagian penting dari transparansi dalam pelaksanaan kegiatan belanja langsung. Kejelasan yang dilakukan seperti :

1. Melakukan konsultasi/asistensi rencana kerja anggaran dengan Badan Keuangan, dan Bappeda.
2. Kejelasan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban.
3. kejelasan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan
4. Kejelasan kaporan realisasi keuangan dan fisik belanja langsung.

Sumber-sumber

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut menyangkut para pejabat/staf yang memiliki keahlian/kemampuan melaksanakan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Dalam kenyataannya sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan, khususnya yang mengelola kegiatan belanja langsung, diakui tenaganya masih terbatas, seperti : petugas pelaksana teknis kegiatan, tenaga teknis bangunan sekolah, tenaga pengadaan barang dan jasa (yang bersertifikasi), dan tenaga akuntansi keuangan, justeru yang banyak sumber daya aparaturnya adalah berpendidikan sosial/keguruan. Keadaan ini sebenarnya menjadi kendala dalam melaksanakan anggaran belanja langsung, apabila terpenuhinya minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBD.

Untuk fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan belanja langsung yang sangat penting dalam membantu pengolahan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan seperti komputerisasi cukup tersedia. Selain itu juga tersedianya sarana pendukung kendaraan roda dua untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi belanja langsung, khususnya pengadaan barang yang bersifat fisik.

Kecenderungan-kecenderungan

Jika para pelaksana kegiatan belanja langsung bersikap baik terhadap kebijakan, dan hal ini berarti ada dukungan, Begitu juga sebaliknya, apabila tidak bersikap baik maka implementasi kebijakan akan jadi sulit. Jadi pengelola kegiatan belanja langsung rata-rata menyadari adanya faktor kecenderungan dengan sikap dan tingkah laku yang baik dan mereka juga berpendapat, bahwa karena sikap dan perilaku yang tidak baik dan ketidakhatian-hatian, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Mereka juga menyadari sebagai pelajaran, dimana begitu banyaknya kasus-kasus penyimpangan belanja langsung pendidikan yang dilakukan oleh aparat dilingkungan instansi pendidikan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang penting terhadap implementasi kebijakan, salah satunya adalah menyangkut standard operating procedures (SOP). SOP dalam struktur birokrasi sangat penting untuk dipedomani untuk memberikan keseragaman tindakan dan penilaian. Dalam implementasi belanja langsung

pendidikan, ada beberapa SOP yang menjadi pedoman mereka, seperti :

- a. Program/kegiatan belanja langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan kedalam uraian tugas.
- b. Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- d. Pedoman standard barang dan jasa.

KESIMPULAN

Dari implementasi kebijakan belanja langsung pendidikan, dapat disimpulkan bahwa dari segi komunikasi ternyata berjalan baik, hal ini dapat diukur dari seringnya melakukan komunikasi dalam bentuk meminta advice/asistensi dan konsultasi. Dari segi sumber-sumber, diakui masih dihadapkan kepada keterbatasan pejabat/pelaksana yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, tenaga teknis serta tenaga akuntansi keuangan. Keterbatasan ini bisa diatasi dengan ikut pelatihan-pelatihan dan konsultasi. Dari segi kecenderungan-kecenderungan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan-penyimpangan, tidak saja bermodalkan latar belakang pendidikan tetapi mereka merasa yang paling penting adalah mental, sikap dan perilaku yang baik. Sedangkan dari segi struktur birokrasi, dapat diukur dari aturan-aturan dan prosedur yang mereka laksanakan. Mereka sebagai pejabat/pelaksana tidak berani mengambil resiko tanpa mengacu kepada peraturan-peraturan/kebijakan, dan prosedur yang mengatur pengelolaan belanja langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Edwar III, George. C., 1980, Implementasi Public Policy, Washington DC, Congressional Quarterly, Inc

Sanusi, A., 2008, Kebijakan Publik, Uninus Bandung.

Sukmadinata, N.S., 2007, Metode Penelitian Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Winarno B, (2004), Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presendo Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.